

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) M'Rian Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka terkait Analisis pengelolaan keuangan BUMDes Tahun Anggaran 2019-2021 belum secara keseluruhan berjalan dengan ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diadopsi dalam pengelolaan keuangan BUMDes, sebab untuk saat ini belum ada regulasi yang merujuk terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes. Berikut beberapa tahapan pengelolaan keuangan BUMDes yang masih terdapat kendala sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, berjalan dengan baik karena di setiap awal tahun BUMDes M'Rian dikatakan sudah baik namun dalam pemanfaatan modal kurang tepat sehingga mengalami defisit pendapatan dimana pengeluaran di tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan setiap pendapatan yang diterima BUMDes M'Rian

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik, karena lemahnya aparatur BUMDes M'Rian dalam mengelola keuangan yaitu BUMDesa M'rian tidak menampilkan pencatatan laporan perkembangan dari masing-masing produk daun marungga, sehingga tidak diketahui dengan jelas atau pasti hasil berapa jumlah pendapatan dan biaya dalam satu tahun berjalan.

c. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan belum berjalan dengan baik, dimana dalam pencatatan masih menggunakan metode sederhana, pencatatan dilakukan secara manual dan tingginya resiko *human error* dalam menyajikan sistem informasi akuntansi BUMDes yang bersifat akuntabel dan transparan.

d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan sudah berjalan dengan baik, namun pelaporan masih disampaikan secara lisan maupun pencatatan secara manual tanpa melalui media *online*. Setiap jenis pelaporan masih menggunakan pencatatan secara manual yaitu melalui rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran tahun 2019-2021 yang dimana angka dan penempatan nama akun berbeda dengan laporan keuangan yang dicatat menggunakan excel dan melalui aplikasi SIA BUMDes.

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban BUMDes M'Rian masih belum berjalan dengan baik, dimana pertanggungjawaban sudah kewajiban bagi setiap aparat desa dalam memberikan laporan sesuai dengan realisasi keuangan BUMDes. Dalam memberikan laporan tahunan kepada Dinas PMD Kabupaten Malaka, Kepala Desa Kufeu, dan Masyarakat Desa Kufeu, namun di tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan oleh pihak BUMDes M'Rian hanya dilakukan pada tahun 2019 saja. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (2) menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka, agar mampu bekerjasama dalam pengembangan SDM khususnya pada bidang pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian.
- b. Kepada Pemerintah Desa Kufeu, agar lebih memperhatikan pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
- c. Kepada Pengelolaan BUMDes M'Rian, agar lebih dalam memaksimalkan kinerja, potensi desa serta memperhatikan standar operasional.
- d. Kepada Masyarakat Desa Kufeu, agar dapat membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional BUMDes M'Rian sehingga mampu terciptanya tujuan BUMDes M'Rian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahrofi,Zubi. 2022. *BUMDes Harus Didukung SDM Berkualitas Demi Kemandirian Desa*, <https://www.antaraneews.com/berita/2721709/mendes-bumdes-harus-didukung-sdm-berkualitas-demi-kemandirian-des>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 00.20.
- Mahpuz,Khairil. 2020. *Sejarah Terbentuknya Desa Di Indonesia*. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/11/10/sejarah-terbentuknya-des-didukung-sdm-berkualitas-demi-kemandirian-des>. diakses pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 02.12.
- Mirnawati. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan)*. Tanjung Pinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Naily, Rofidah. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pemerintah Desa Kufeu. *Himpunan Dokumen RAPB-Des Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka Tahun 2017-2021*
- Peraturan Desa Kufeu Nomor 4 Tahun 2018 *Tentang Pendirian Bumdes M'Rian Desa Kufeu*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*
- Ramadan,Dimas. 2019. *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sadesa,Ari. 2021. *Prinsip Pengelolaan BUMDes*.[https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan bumdes pengurus bumdeswajibtahu/#:~:text=Prinsip%20pengelolaan%](https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan-bumdes-pengurus-bumdeswajibtahu/#:~:text=Prinsip%20pengelolaan%20diakses%20pada%20tanggal%2011%20Mei%202022%20Pukul%2020.00) diakses pada tanggal 11 Mei 2022 Pukul 20.00

Sujarweni,Wiratna. 2019. *AKUNTANSI DESA Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Jl. Wonosari Km 6, RT 04, Demblaksari, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Titioka Baretha, Huliselan Meny, Sanduan Abdullah, Ralahallo Fransiska, Siahainenia Astrid.Vol 03. No. 01, Juni 2020. *Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru*. Maluku: Politeknik Negeri Ambon, Universitas Pattimura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Yosephine, Archangela. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018-2020 Studi Kasus Pada Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rere+Paulina+bibiana&oq=#d=gs_qabs&t=1675926337707&u=%23p%3Dz9fj6BMCNjYJ